

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Akan tetapi dalam kenyataannya masalah kesenjangan sosial secara mendasar belum dapat di pecahkan. Menyadari keadaan ini dapat di perkecil, tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Permasalahannya adalah bagaimana memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah yang masih berada dalam kondisi tidak mampu atau tidak berdaya di segala hal.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur pedesaan. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu di arahkan untuk kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dan pembangunan yang di lakukan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat di pesisir sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi. Nampaknya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus melawan kemiskinan dan kesenjangan yang utama sesungguhnya berada di desa.

Kemiskinan juga di ikuti oleh ketidak berdayaan. Orang miskin tidak memiliki daya atau kemampuan yang cukup. Banyak tidak berdaya

ekonomi, pendidikan, politik social, maupun kekuasaan. Ketidakberdayaan ekonomi di sebabkan oleh terbatasnya akses produksi, alat produksi kegiatan pelayanan jasa dan lain lain. Ketidakberdayaan di bidang pendidikan sangat nyata terlihat bahwa orang orang miskin rata rata memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Dengan demikian orang miskin tidak memiliki wawasan yang cukup yang dapat menjadi modal yang berharga. Orang miskin tidak berdaya, tidak dapat mengembangkan wawasan dengan demikian sangat rentan terhadap kemajuan ilmu dan teknologi, dan akhirnya menjadi orang yang selalu tertinggal.

Strategi untuk memberdayakan masyarakat yang belum berdaya adalah merupakan suatu masalah yang cukup pelik dan memerlukan strategi yang baik untuk dapat mengatasinya. ¹Inti konsep pemberdayaan Masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. Adapun masyarakat yang perlu di berdayakan antara lain adalah kaum buruh, petani, nelayan, orang miskin kota dan orang miskin desa.

Indonesia merupakan 2/3 dari seluruh wilayah berupa perairan dengan potensi sumber daya ikan dan lainnya. Dengan potensi tersebut, sudah selayaknya pembangunan sektor kelautan dan perikanan didorong

perkembangannya agar dapat mendukung pembangunan secara nasional². Sebagian besar nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagian pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi penguasa ekonomi di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya.

Kebijakan pembangunan kelautan, selama ini, cenderung lebih mengarah kepada kebijakan "produktivitas" dengan memaksimalkan hasil *eksploitasi* sumber daya laut tanpa ada kebijakan memadai yang mengendalikannya. Akibat dari kebijakan tersebut telah mengakibatkan beberapa kecenderungan yang tidak menguntungkan dalam aspek kehidupan, seperti:

1. Aspek Ekologi, *overfishing* penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan telah cenderung merusak ekologi laut dan pantai (*trawl*, bom, potas, pukat harimau, dll) akibatnya menyempitnya wilayah dan sumber daya tangkapan, sehingga sering menimbulkan konflik secara terbuka baik bersifat vertikal dan horisontal (antara sesama nelayan,

² Kusnadi, *Insinerasi* ...

Keuangan Pusat dan Daerah sebagai landasan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan. Maka Pemerintah Daerah banyak mendapat kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kebijakan pembangunan secara otonom, yang diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kalaulah kita perhatikan begitu banyak persoalan nelayan kita dan itu merupakan PR besar bagi pemerintah kita, agar pemerintah kita lebih bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. permasalahan tidak hanya terjadi dalam konteks nasional. Permasalahan ini juga terjadi pada masyarakat nelayan di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Sejarah mencatat bahwa hasil sumber daya laut yang dihasilkan Oleh Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah penghasil ikan terbesar ke-2 didunia pada tahun 1920an.⁴ Saat sekarang ini khususnya di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sebutan itu hanya tinggal kenangan dimata masyarakat BaganSiapiapi Kecamatan Bangko.

Rokan Hilir Khususnya Kecamatan Bangko, mata pencaharian masyarakat di sana kebanyakan sebagai nelayan dan buruh nelayan. Masyarakat bergantung pada sumber daya laut yang ada Dimana masyarakat beupaya mencari uang untuk kehidupan ekonomi keluarganya. Para nelayan ada yang bergantung pada tengkulak besar yang di kuasai hampir semua oleh orang cina yang menguasai Perekonomian di kecamatan bangko khususnya di

⁴ Pemerintah D. Rokan Hilir

masalah perikanan. Di Kecamatan Bangko Kota Bagansiapiapi Juga memproduksi pembuatan kapal penangkap ikan yang di jual ke Jakarta, Pekalongan dan Yang lainnya.

Seiring berjalanya waktu, dengan di berlakukannya Otonomi Daerah dan Terbentuk Kabupaten Rokan Hilir para nelayan di Kecamatan Bangko Di hadapkan dengan keadaan yang serius dengan di tutupnya Dok-dok pembuatan kapal yang disebabkan mahalnya harga kayu yang terjadi akibat ilegal logging. Permasalahan yang terjadi berdampak pada sebagian para tengkulak-tengkulak orang cina tersebut menutup produksinya, sehingga masyarakat yang mata pencaharian sebagai nelayan banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan para nelayan yang tradisional hanya menangkap ikan untuk keperluan sehari hari karena terbatasnya sarana dan peralatan untuk memproduksi ikan yang lebih banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka sendiri.⁵

Dalam masalah ini tentu Pemerintah Daerah Harus memberdayakan masyarakat nelayan di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran Baik itu Pemerintah Daerah maupun masyarakat nelayan tersebut, serta kemampuan mereka dari segi pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki dan juga tingkat kemandirian masyarakat nelayan tersebut.

Kecamatan Bangko adalah salah satu dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dan letaknya secara geografis

⁵ Metro Pinn.com 6 Juli 2006

kabupaten Rokan Hilir penduduk Kecamatan Bangko sebagian mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Disamping sebagai nelayan masyarakat di Kecamatan Bangko juga bermata pencaharian pertanian, usaha, jasa dan Lainnya.

B. Rumusan Masalah

Menurut Muhammad Hatta Pengertian Masalah adalah :

“ Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan hati tentang kedudukannya, kita tidak puas dengan melihatnya melainkan ingin mengetahuinya ”⁵

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dari peneliti dalah:

“ Bagaimana Peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir 2005-2007”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar mengetahui sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam mengupayakan para nelayan di Kecamatan Bangko untuk meningkatkan perekonomiannya

- b. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi sumberdaya laut sehingga bermanfaat untuk masyarakat

2. Manfaat penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut
- b. Memberikan masukan pada Pemerintah Daerah dan para nelayan untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelola potensi sumber daya laut yang di hasilkan.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel variabel dan hubungan antar variabel yang di dasarkan pada konsep dan defenisi tertentu. Unsur utama dan sangat penting dalam melakukan penelitian adalah teori. Defenisi teori menurut Nasri Singarimbun dan Soffian Efendi adalah :

Serangkaian asumsi, konsep, kontak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁶

Sedangkan DR. Irawan Soehartono mengemukakan :

Teori merupakan proposisi yang memberikan penjelasan atau sutau gejala.⁷

⁶ Nasri Singarimbun dan S. S. Effendi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (MADRID)

Untuk menjelaskan Mengenai strategi Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, ada beberapa kerangka pemikiran sebagai acuan, dalam kerangka dasar teori yang digunakan adalah :

1. Peran

Soekanto mendefenisikan peranan (*role*) sebagai berikut:

”Peranan merupakan aspek dinamika dari status(kedudukan) apabila seseorang atau lembaga yang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan.”⁸

Pembedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedua duanya tidak dapat di pisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan ataupun kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, Setiap orang mempunyai macam macam peranan yang berasal dari pola pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang di berikan masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan

⁷ Irawan Soehartono, Metode penelitian Sosial, Remaja Rosdikarya, Bandung, 1995. hal 6

⁸ Soekanto Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Remaja Rosdikarya, Bandung, 1991. hal 117

akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.⁹ Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu individu dalam masyarakat. Peranan diatur dalam norma-norma yang berlaku

Perana yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakupi 3 (tiga) hal,¹⁰ yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Perana dalam arti ini merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

⁹ Ely Chinay, *Society an Indroduction to Sosiology*, Cetakan Pertama, Random House, New york 1961

¹⁰ Levinger, P. L. P. Elyly H. S.

2. Pemerintah Daerah

Dalam pasal 1 ayat 1 UU 1945 menerapkan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, menganut azas desentralisasi dalam menyelenggara Otonomi Daerah.

Selanjutnya dalam pasal 18 UUD 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa :

“Pembangunan daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintah ditetapkan dengan Undang Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul Daerah yang bersifat istimewa.”

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintah daerah sekarang yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, Pengertian Pemerintah daerah¹¹ adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Adapun perangkat daerah Otonom adalah dinas-dinas yang membidangi berbagai bidang.

Dengan dikeluarkannya Undang Undang nomor 22 tahun 1999 maka terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah.

Secara Teoritis ada enam elemen utama yang membentuk Pemerintahan Daerah yaitu¹² :

¹¹ UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Karya Utama Surabaya, Hal 12

¹² Afandi Nur Achmad, *Isu-isu Strategis Penataan Otonomi Daerah, Dalam Strategi Pembangunan daerah dalam Kerangka Otonomi Masyarakat*, 2000

- a. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
- b. Adanya kelembagaan yang merupakan perwujudan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
- c. Adanya personil pegawai yang bertugas untuk menjalankan urusan otonom yang menjadi isi rumah tangga daerah.
- d. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan Otonomi Daerah
- e. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil rakyat yang mendapat legitimasi untuk memimpin penyelenggara otonomi daerah
- f. Adanya manajemen urusan otonomi yaitu penyelenggara otonomi daerah agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.

Menurut undang-undang No 22 tahun 1999 pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan DPRD. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa DPRD bukanlah bagian dari Pemerintah Daerah. Ia merupakan Badan Legislatif Daerah sekaligus sebagai lembaga pengawasan Pemerintah. Dengan demikian diharapkan aspirasi rakyat akan tersalur dan kontrol masyarakat akan semakin luas dan terbuka.

1) Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Dinas Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis yang sesuai dengan lingkup tugasnya
- b) Pemberian Perijinan dan Pelaksana pelayanan umum
- c) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkungan tugasnya.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Organisasi dari Dinas Daerah Terdiri dari :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Bagian Tata Usaha yang membawahi Sub Bagian sebagian unsur pembantu pimpinan

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- ❖ Sebanyak banyaknya 4 (Enam) bidang dan 1 (satu) Bagian tata usaha.
- ❖ Bagian Tata Usaha membawahi sebanyak banyaknya 3 (tiga) Seksi
- ❖ Masing-masing bidang membawahi sebanyak banyaknya 3 (tiga) Seksi
- ❖ Unit pelaksanaan Teknis Dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

2) Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas yang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala dinas bertugas merealisasikan tugasnya di daerah Kabupaten yang berada dalam lingkup wilayah yang mempunyai wewenang untuk pelaksanaan tugas dibidang Perikanan dan Kelautan berdasarkan atas pedoman undang-undang, Keputusan menteri dan Peraturan daerah. Fungsi dan tugas yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebagai lembaga instansi pemerintah daerah yang mengurus masalah Perikanan dan kelautan. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Fungsi

- Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan Uunsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang Perikanan dan Kelautan.
- Dinas Perikanan dan Kelautan di pimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang di berikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Propinsi di bidang Perikanan dan Kelautan. Untuk menyelenggrakan tugas tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Perikanan dan Kelautan
 - b. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perikanan dan Kelautan
 - c. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
 - d. Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan dan kelautan
 - e. Pelaksanaan Pengamanan Teknis sesuai dengan Tugas Pokoknya
 - f. Pelaksanaan Pengelolaan unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Perikanan dan Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan Program Pembangunan perikanan dan kelautan yaitu:

1. Pengembangan Sumber daya Manusia pelaku perikanan
2. Pengembangan usaha perikanan rakyat
3. Pembinaan Usaha perikanan rakyat
4. Peningkatan sarana dan prasarana

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang tidak dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah pembatasan waktu dan dana. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan Adanya kesadaran komunitas. diharapkan dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan serta mengeliminir terbentunya solidaritas komunal semu pada masyarakat. Kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat di butuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek, namun lebih jauh dari itu, pemberdayaan di lakukan untuk strategi kemandirian social ekonomi masyarakat jangka panjang. Hal yang perlu di perhatikan dalam proses pemberdayaan adalah bagaimana seseorang memahami esensi pemberdayaan secara benar dan bagaimana memilih strategi yang tepat untuk pemberdayaan.¹³

¹³ Supriatna & Hamri, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 10.

Menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian di lepas untuk mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap di lakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Dari beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat di atas dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses belajar bagi masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka dan di lakukan dengan bertahap serta secara terus menerus sehingga mencapai kemandirian. Setelah masyarakat itu mandiripun masih harus tetap dijaga agar jangan sampai terjadi kemunduran.

Dasar Pemikiran pemberdayaan masyarakat berarti pula melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, sejalan dengan pemikiran tersebut, dapat di ketengahkan teori tentang pemberdayaan yang menjadi 6 (enam) hal pengertian untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat yaitu :

a. Alasan masyarakat perlu di berdayakan

Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan desa, melibatkan masyarakat dalam menunjang keberhasilan

masyarakat tujuan pembangunan tidak akan tercapai secara maksimal.

Menurut konsep Direktorat jendral pembangunan Desa Departemen untuk pemberdayaan dalam Negeri¹⁴ :

“Pembangunan desa selalu mengusahakan agar dapat memecahkan masalah, permasalahan tentang pembangunan desa langkah pertama mengusahakan dapat tersalurkanya aspirasi masyarakat desa sehingga dapat menumbuhkan gairah dan kepercayaan serta semangat membangun di kalangan masyarakat.”

b. Strategi yang dapat di lakukan untuk memberdayakan masyarakat.

Untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan supaya hasil pembangunan tetap lestari dan berkelanjutan strategi untuk memberdayakan masyarakat harus tetap berkembang. Dari berbagai pengalaman pelaksanaan pembangunan selama ini untuk memberdayakan masyarakat perlu penyiapan peran serta masyarakat, dalam hal ini telah di tetapkan oleh Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri, tentang pola penyiapan peran serta masyarakat.

“Di dalam melaksanakan program pembangunan, biasanya dimulai dengan menyusun usulan pembangunan yang tertuang dalam daftar usulan proyek (DPU) setelah di setujui oleh pemerintah kemudian di terbitkan daftar isian proyek (DIP) sebagai pedoman kegiatan

¹⁴ Dirjen Banda Sista...
14 Dirjen Banda Sista...
14 Dirjen Banda Sista...

proyek, di dalam melaksanakan proyek pemerintah meminta kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pembangunan yang berupa tanah, tenaga, material, atau uang, dalam proses pembangunan diatas bentuk peran serta masyarakat masih terbatas pada tahap pelaksanaan pembangunan konstruksi serta pengaruh perencanaan dari atas (Top Down Planing) masih sangat kuat. Dari hasil pengamatan dan beberapa studi evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar sarana dan prasarana yang telah dibangun dengan pendekatan seperti tersebut diatas kurang dipelihara dengan baik.”

Dari konsep pemberdayaan masyarakat diatas, strategi pemberdayaan dilaksanakan melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan pendekatan sebagai subyek pembangunan, masyarakat memutuskan perlunya kegiatan pembangunan, kemudian merencanakan dan melaksanakan pembangunan dimaksud dengan langkah-langkah :

1) Inisiasi

Strategi bahwa hasil pembangunan yang diputuskan merupakan keputusan masyarakat itu sendiri

2) Partisipasi

Strategi bahwa dalam pelaksanaann pembangunan partisipasi (ikut terlibat dalam pembangunan) adalah usulan

3) Mobilisasi

Strategi bahwa dalam pelaksanaan pembangunan memanfaatkan potensi yang terkandung dalam masyarakat dan lingkungannya diarahkan, dikendalikan dan digunakan dalam pembangunan.

c. Wujud pemberdayaan masyarakat

Pembangunan masyarakat berarti pula melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan menurut Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dalam pedoman dan usaha-usaha gotong royong masyarakat :

“Potensi yang terkandung dalam masyarakat dan wilayah lingkungannya supaya diarahkan, dikendalikan dalam usaha-usaha pembangunan tersebut serta ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya dalam bentuk menggerakkan karya, tenaga, daya, dan dana yang dimiliki masyarakat kedalam usaha gotong royong sebagai partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan.”

Memperhatikan uraian tersebut diatas tampak bahwa wujud pemberdayaan masyarakat merupakan usaha menimbulkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk gotong royong,

menerus akan menimbulkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

- d. Kesadaran masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat melihat dan menyikapi kondisinya saat itu, tingkat kesadaran ini dapat dilihat dari :
- 1) Sikap masyarakat, yaitu merupakan suatu keteraturan antara perasan, daya nalar atau kemampuan berfikir Untuk bertindak laku atau berindak atau memperlakukan potensi lingkungan.
 - 2) Perilaku masyarakat yaitu tingkah laku masyarakat dan ini merupakan pencerminan dari sikap masyarakat itu sendiri.
- e. Kemampuan masyarakat yaitu kesanggupan, kecakapan atau kekuatan yang dimiliki masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan. Kemampuan masyarakat ini dapat dilihat dari :
- 1) Pengetahuan masyarakat yaitu kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk memecahkan masalah dan daya cipta untuk menyelesaikan masalah.
 - 2) Keterampilan yang dimiliki masyarakat yaitu kemampuan dan penguasaan teknis oprasional mengenai bidang yang bersifat kekaryaan.
- f. Kemandirian masyarakat yaitu merupakan suatu kondisi yang di alami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang

4. Masyarakat Nelayan

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:

- a. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja di sekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya di jual ke masyarakat sekitarnya atau di bawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi

- c. Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d. Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

E. Defenisi Konsepsional

Konsep dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak di teliti. Konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lain.¹⁵

Dengan demikian definisi konsep dimaksud untuk membatasi pengertian-pengertian yang berhubungan dengan istilah-istilah dalam rangka penelitian ini.

¹⁵ Sinambing, M. J. L. S. F. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Adapun konsep-konsep yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Peran adalah langkah-langkah (rencana yang cermat) mengenai kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.
2. Dinas Perikanan dan kelautan adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas bertugas merealisasikan tugasnya di Daerah Kabupaten yang berada dalam lingkup wilayah yang mempunyai wewenang untuk pelaksanaan tugas di bidang Perikanan dan Kelautan
3. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses belajar bagi masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka dan dilakukan dengan bertahap serta secara terus menerus sehingga mencapai kemandirian.
4. Masyarakat nelayan, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut.

F. Definisi Operasional

Menurut Sofyan Efendi, Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, Definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.¹⁶

Penelitian Terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Bangko, akan menganalisis data dengan menggunakan indicator-indikator sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Pemberdayaan Masyarakat nelayan di kecamatan Bangko.
 - Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perikanan dan kelautan .
 - Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perikanan dan kelautan
 - Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan pelayanan umum
 - Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan
 - Pelaksanaan Pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokok
2. Program Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bangko.
 - Pengembangan sumberdaya manusia pelaku perikanan
 - Pengembangan Usaha Perikanan Rakyat
 - Pembinaan Usaha Perikanan Rakyat
 - Peningkatan sarana dan Prasarana

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa yang terjadi di

pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁸

2. Unit Analisa

Untuk mengetahui tentang bagaimana Peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bangko, peneliti membutuhkan informasi sebagai pendukung dalam memperoleh data

Adapun unit analisa peneliti adalah:

- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.

Responden

- Ir.H. Amrizal, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
- Muhammad Amin, S.Pi M.Si, Kasubbag perencanaan dan Program.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh dari responden dan berupa keterangan dari pihak pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dalam hal ini beberapa pegawai di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Sekunder

Adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan yang menggunakan data yang telah tersedia berupa bahan-bahan pustaka

¹⁸ Hasan, Sutrisno, *Belah Belah* (1997), hal. 100. Diakses dari: <http://www.stipad.com>

4. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik non probability Sampling, yaitu tidak semua anggota sample. Dalam hal ini akan dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu pengambilan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi di sesuaikan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat pengumpulan data yang mendukung peneliti. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah dilakukan dengan mewawancarai subyek penelitian (yaitu meraka para responden atau Informan).

Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara itu sendiri adalah :

“Sebagai suatu proses tanya jawab secara lisan dimana seseorang atau beberapa orang saling berhadap hadapan secara langsung, merupakan alat pengumpulan data atau informasi langsung tentang berbagai jenis data sosial yang terpendam maupun manifest.”¹⁹

Dalam wawancara ini pihak-pihak yang di wawancarai adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Rokan

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andy Yogyakarta, 1994, hal 103

Dalam wawancara ini pihak-pihak yang di wawancarai adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Rokan Hilir dan pegawai Dinas. Wawancara bersifat pedoman artinya wawancara dituntun dulu oleh sejumlah pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, ada catatan-catatan yang di miliki oleh unit analisa sehingga dapat di manfaatkan guna memperoleh serta melengkapi data-data.

c. Kuisioner

Teknik ini merupakan metode pengumpulan data di mana penyusunan menggunakan daftar pertanyaan untu di jawab oleh responden. Adapun responden dalam penelitian ini adalah para nelayan di kecamatan bangko.

6. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penyusun menggunakan teknik analisa data kualitatif, yaitu analisa data yang tidak dapat diukur langsung karena bukan menunjukkan satu angka angka tetapi dalam bentuk kategori kategori data sejenis kemudian dikelompokkan, selanjutnya ditentukan dan di klasifikasikan dengan kenyataan menurut tingkat kegiatan untuk menganalisa data yang diperoleh.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan

data ke dalam suatu bentuk yang lebih bermakna.

temukan dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data. dalam melakukan analisis data ada tahap tahapan yang harus dilalui yaitu¹⁹ :

a. Mengorganisasikan data

Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, dan sebagainya. Dalam tahap ini yang harus di kerjakan adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya.

b. Kategorisasi

Kategorisasi berarti penyusunan kategori yang tidak lain adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang di susun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu.

c. Pengolahan data

Karena analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur langsung karena bukan berupa angka-angka, sehingga pengolahan data dilakukan dengan cara mengkategorisasikan data yang sejenis.

d. Penyajian data

Data yang telah diolah selanjutnya di sajikan. Penyajian data ini dapat dibentuk tabulasi maupun dalam bentuk deskripsi, tergantung pada jenis data tersebut.

¹⁹ Moleong, Lexy I. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kesembilan. PT Remaja Rosdakarya

e. Penafsiran data

Sebenarnya penafsiran data sudah dimulai dilakukan sejak penelitian dimulai atau sejak dilapangan. Dengan kata lain sejak itu sudah ada penghalusan data, penyusunan kategori dengan